

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Setelah melihat beberapa literatur yang ada di berbagai laman dan tempat dalam kajian pustaka ini penulis melihat ada beberapa penelitian serupa atau penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan penelitian, antara lain :

1. Sanusi dan Darmawan (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Darmawan berjudul *"Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan objek organisasi kepemudaan, yaitu Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana pendidikan politik dapat membentuk karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda. Dalam penelitian ini, teori sosiologi secara eksplisit tidak banyak digunakan, melainkan lebih banyak mengandalkan nilai-nilai normatif bangsa Indonesia sebagai kerangka acuan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap peranan pendidikan politik dalam membentuk karakter dan meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Namun, perbedaannya, penelitian Sanusi dan Darmawan berfokus pada organisasi kepemudaan di masyarakat luas, sementara penelitian ini berfokus khusus pada mahasiswa di lingkungan kampus FISIPOL UMB dengan menggunakan pendekatan teori sosiologi dari Berger dan Merton.

2. Azmi et al. (2023)

Penelitian Azmi dan rekan-rekannya mengangkat topik *"Pendidikan Politik sebagai Sarana Mewujudkan Masyarakat Demokratis"*. Studi ini dilakukan melalui analisis konseptual dan normatif, dengan mengkaji

pentingnya pendidikan politik dalam membentuk masyarakat yang demokratis tanpa menitikberatkan pada kelompok sosial tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat secara umum, sehingga pendekatannya lebih bersifat makro. Dalam kajiannya, Azmi et al. tidak menggunakan teori sosiologi tertentu, melainkan lebih banyak mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi secara teoritis. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai sarana penanaman nilai demokrasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajiannya, di mana penelitian Azmi bersifat umum terhadap masyarakat luas, sedangkan penelitian ini spesifik mengkaji implementasi pendidikan politik pada mahasiswa FISIPOL UMB dalam konteks membangun budaya demokratis.

3. Wawan Patriansyah et al. (2024)

Wawan Patriansyah dan tim melakukan penelitian berjudul *"Analisis Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana pendidikan politik mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pemilu. Teori yang digunakan lebih mengarah pada teori partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam konteks ilmu politik. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas mahasiswa sebagai subjek penelitian dalam konteks pendidikan politik. Namun, perbedaannya terletak pada fokus yang diambil. Patriansyah et al. menitikberatkan pendidikan politik pada peningkatan partisipasi elektoral di Pemilu, sedangkan penelitian ini lebih luas, berusaha membangun budaya demokratis mahasiswa dalam kehidupan sosial-politik sehari-hari di lingkungan kampus.

4. Sukarno (2011)

Penelitian Sukarno berjudul *"Pendidikan Politik dalam Demokratisasi"*, mengkaji pendidikan politik dari sudut pandang normatif dan filosofis.

Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya pendidikan politik sebagai alat untuk memperbaharui dan mendinamisir lembaga-lembaga demokrasi, tanpa mengambil studi kasus institusional tertentu. Sukarno menggunakan pendekatan yang bersifat umum dan filsafati terhadap konsep demokrasi, tanpa menggunakan teori sosiologi secara eksplisit. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada keyakinan bahwa pendidikan politik merupakan sarana penting untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Perbedaannya, Sukarno hanya membahas pada tataran konsep teoritis tanpa mengaitkan dengan studi kasus nyata, sedangkan penelitian ini mengkaji secara aplikatif bagaimana pendidikan politik diimplementasikan di FISIPOL UMB dan dianalisis menggunakan teori rekonstruksi sosial serta struktural fungsional.

#### 5. Penelitian Ini

Penelitian ini mengangkat tema *"Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa FISIPOL UMB Guna Membangun Budaya Demokratis"*. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi pendidikan politik di lingkungan kampus untuk membentuk budaya demokratis dan kesadaran kritis di kalangan mahasiswa. Teori yang digunakan adalah teori rekonstruksi sosial dari Peter L. Berger yang melihat pendidikan sebagai proses pembentukan realitas sosial, serta teori struktural fungsional dari Robert K. Merton yang melihat pendidikan sebagai mekanisme penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat struktur demokrasi. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena menggabungkan kajian teoritis dengan studi kasus konkret di lingkungan FISIPOL UMB, serta secara spesifik berusaha mengkaji pembentukan budaya demokrasi bukan hanya dalam konteks elektoral, melainkan dalam kehidupan mahasiswa sehari-hari.

**Gambar 2.1** Tabel Perbandingan Penelitian

| <b>No.</b> | <b>Peneliti</b>                 | <b>Judul / Fokus Penelitian</b>                                                                 | <b>Metode / Pendekatan</b>                | <b>Temuan Utama</b>                                             | <b>Perbedaan dengan Penelitian Ini</b>                                      |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | Sanusi & Darmawan (2016)        | Pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya di organisasi kepemudaan | Studi deskriptif pada organisasi pemuda   | Pendidikan politik membentuk kepemimpinan berkarakter Pancasila | Fokus pada organisasi kepemudaan, bukan pada mahasiswa dan perguruan tinggi |
| <b>2</b>   | Azmi et al. (2023)              | Pendidikan politik sebagai sarana menciptakan masyarakat demokratis                             | Analisis konseptual dan normatif          | Pendidikan politik penting dalam menanamkan nilai demokrasi     | Pendekatan bersifat makro, tidak spesifik pada lingkungan kampus            |
| <b>3</b>   | Wawan Patriansyah et al. (2024) | Peran pendidikan politiki dalam membangun kesadaran mahasiswa berpartisipasi di Pemilu          | Studi kasus dengan pendekatan kuantitatif | Pendidikan politik memengaruhi partisipasi pemilu               | Fokus pada partisipasi elektoral, bukan pada budaya demokratis secara luas  |

|   |                | 2024                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                              |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Sukarno (2011) | Pendidikan politik dalam proses demokratisasi                                    | Pendekatan normatif-filosofis                            | Pendidikan politik sebagai alat pembaruan lembaga demokrasi                   | Analisis lebih filosofis, tanpa studi kasus institusional spesifik           |
| 5 | Penelitian Ini | Implementasi pendidikan politik di FISIPOL UMB untuk membangun budaya demokratis | Studi kualitatif dengan pendekatan teori Berger & Merton | Pendidikan politik membentuk budaya demokratis dan kesadaran kritis mahasiswa | Fokus lokal pada FISIPOL UMB dan penggunaan teori sosiologi secara aplikatif |

## 2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk budaya demokratis di kalangan mahasiswa. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan wawasan mengenai sistem politik, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan sikap kritis, nilai-nilai demokrasi, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di FISIPOL UMB, pendidikan politik diimplementasikan melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Melalui interaksi sosial, diskusi, seminar, dan kurikulum yang mengintegrasikan aspek-aspek politik, diharapkan mahasiswa dapat merekonstruksi pemahaman mereka

mengenai demokrasi dengan cara yang lebih mendalam dan aplikatif. Dalam kerangka konsep penelitian ini, pendidikan politik diposisikan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya demokratis sebagai variabel dependen. Di sini, pendidikan politik terlihat sebagai proses sosialisasi nilai, sedangkan budaya demokratis tercermin dalam sikap kritis, penghargaan terhadap perbedaan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial mahasiswa.

Proses ini melibatkan identifikasi, review, dan sintesis literatur-literatur relevan, serta memastikan teori yang dipilih dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Diharapkan kajian teoritis ini dapat membantu merincikan landasan teoritis, memperkuat metode penelitian, dan memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah di dalam bidang tersebut.

### **2.2.1 Implementasi**

Implementasi adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Proses implementasi dimulai setelah semua aspek perencanaan dianggap telah sempurna. Menurut teori Jones, implementasi merujuk pada "aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan sebuah program" (proses mewujudkan program hingga menghasilkan hasil yang terlihat). Dengan demikian, implementasi merupakan langkah yang diambil setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai target yang diinginkan. Nurdin Usman, dalam bukunya yang berjudul "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum," memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian implementasi sebagai berikut:

“Implementasi merupakan suatu proses yang berfokus pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dari suatu sistem. Lebih dari sekadar aktivitas, implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu.”

Dengan demikian, pengertian implementasi di atas menggambarkan bahwa ia tidak hanya sekedar kegiatan, melainkan juga merupakan langkah-langkah yang

dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan berlandaskan rencana yang telah disusun dengan baik. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh objek lain, yaitu pelaksanaan suatu program.(Anggraeni, 2019)

Menurut Guntur Setiawan, implementasi dapat dipahami sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan antara tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Hal ini juga melibatkan jaringan pelaksana serta birokrasi yang efektif. Dari pendapat para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi adalah kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, termasuk program kurikulum yang diterapkan di sekolah atau lembaga terkait.(Anggraeni, 2019)

### **2.2.2 Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa adalah orang yang sedang mengenyam pendidikan di universitas, baik yang dibiayai pemerintah maupun swasta, atau lembaga pendidikan lain yang memiliki tingkat kesetaraan. Kata "mahasiswa" terdiri dari dua kata, yaitu "maha" yang artinya lebih atau paling, dan "siswa" yang artinya pelajar. Mahasiswa umumnya berusia antara 18 sampai 25 tahun, yang merupakan masa akhir remaja hingga awal usia dewasa. Di usia ini, mahasiswa bisa memperkuat keputusan hidupnya(Hafizhuddin, 2019).

Secara umum, mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, atau lembaga akademik lainnya. Status mahasiswa diberikan kepada setiap orang yang sedang mengikuti pendidikan tinggi, seperti sarjana, magister, atau doktor. Meski keduanya sedang belajar, ada perbedaan dalam status yang diberikan kepada orang-orang istimewa ini dibandingkan dengan

siswa biasa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah. Menambahkan kata 'maha' di depan 'mahasiswa' memberikan kesan yang lebih penting dan mengagumkan bagi setiap orang yang memperoleh gelar tersebut. (Cora, D. I., Engka, J. N., & Pangemanan, D, 2019).

### **2.2.3 Pendidikan Politik**

#### **1. Pengertian Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus membentuk sikap politik yang aktif dan kritis (Wawan Patriansyah et al. , 2024). Pendidikan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga merangkum nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta tanggung jawab sosial. Bagi mahasiswa, pendidikan politik berperan penting sebagai sarana untuk menanamkan kesadaran berpolitik sejak dini.

Pendidikan politik bukan sekadar penggabungan antara kata "pendidikan" dan "politik"; maknanya jauh lebih luas. Pendidikan politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses pendidikan untuk orang dewasa yang bertujuan untuk membina kemampuan individu dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang mandiri serta mengembangkan perannya sebagai warga negara. Dalam bahasa Inggris, pendidikan politik sering disebut sebagai political socialization atau political education. Jika diterjemahkan secara harfiah, istilah political socialization berarti sosialisasi politik. (Handoyo, Eko & Lestari, 2017)

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membangun budaya politik yang sehat, yang pada gilirannya dapat menciptakan masyarakat demokratis yang bebas dari segala bentuk bias. Politik yang sehat adalah prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat demokratis

tersebut. Tanpa adanya politik yang sehat, arah dari demokrasi dapat terganggu, yang berpotensi menghasilkan kebebasan yang tidak terkendali dan pada akhirnya merusak esensi demokrasi itu sendiri. Di sinilah letak pentingnya pendidikan politik.

Giesecke, seorang ahli didaktik, pendidik, dan politikus Jerman, mengartikan pendidikan politik sebagai berikut:

- a. **Bildungswissen**, yang berarti kemampuan untuk memahami bentuk dan gambaran tentang manusia (*mensbeeld*) serta perkembangannya, di samping juga menghayati budaya bangsa sendiri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat menyadari identitasnya, memiliki keyakinan yang kuat, serta mampu mengatasi kompleks rasa rendah diri dan ketergantungan terhadap kekuatan atau bangsa lain. Selain itu, individu tersebut akan dapat memahami dengan jelas kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup, dan filsafat hidup yang dianut, dalam hal ini Pancasila, yang dijadikan sebagai pedoman dalam perjuangan untuk mencapai tujuan hidup berbangsa, yaitu kehidupan yang sejahtera.
- b. **Orientierungswissen** adalah kemampuan untuk berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membawa kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi setiap warga negara serta umat manusia. Secara objektif, kita harus berani melihat kenyataan yang ada dan bersedia melakukan penyesuaian terhadap situasi politik yang kurang stabil, dengan cara mengkritisi berbagai hal yang masih rentan dan unsur pondasi yang belum kuat. Dengan demikian, kita dapat menemukan solusi dan penyelesaian yang lebih matang, serta berhasil menarik diri dari berbagai jalan buntu menuju keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bersama.

## **2. Tujuan Pendidikan Politik**

Dalam Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 Pasal 31 mengenai Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik memiliki tujuan penting dalam mengedukasi masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.
- b. Mendorong partisipasi politik serta inisiatif masyarakat dalam berperan aktif di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Mengembangkan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, serta membangun karakter bangsa demi menjaga persatuan dan kesatuan.

Selain itu, Khoiron turut menjelaskan bahwa pendidikan politik bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat. Pertama ia menjelaskan bahwasanya pendidikan politik mempromosikan perluasan wawasan Partisipasi dalam pemerintahan, baik di tingkat lokal, provinsi, maupun nasional, sangat penting untuk mendukung proses dan tujuan perkumpulan warga masyarakat sipil. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dasar-dasar sejarah, filsafat, politik, sosial, dan ekonomi demokrasi, serta konstitusi Indonesia dan negara-negara barat. Selanjutnya, penting untuk menanamkan komitmen yang rasional terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai fundamental yang tercantum dalam dokumen inti. Terakhir, kita juga perlu mempromosikan pemahaman tentang peran mendasar dari Lembaga-lembaga berikut berkomitmen untuk mengusung nilai-nilai masyarakat sipil dalam upaya memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, setara, dan bermartabat di Indonesia. (Handoyo, Eko & Lestari, 2017)

## **3. Peran Pendidikan Politik Dalam Perguruan Tinggi**

Azmi et al. (2023) menekankan bahwa pendidikan memiliki kekuatan dalam membentuk cara berpikir dan nilai-nilai politik mahasiswa. Perguruan tinggi, khususnya fakultas ilmu sosial dan politik, memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan pendidikan politik yang kritis dan transformatif. Dalam konteks ini, FISIPOL UMB sebagai institusi pendidikan tinggi yang memfokuskan diri pada ilmu sosial dan politik, memiliki potensi besar dalam membina mahasiswa agar menjadi warga negara yang sadar politik dan aktif dalam demokrasi.

### **2.2.3 Demokrasi**

#### **1. Pengertian Demokrasii**

Demokrasi bisa dilihat dari cara menggambarkan konsep tersebut dalam bahasa (kajian epistemologis) dan penggunaan istilah-istilahnya (kajian terminologis). Secara epistemologis, kata "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang artinya rakyat atau penduduk suatu wilayah, dan "cretein" atau "cratos" yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Jadi dalam bahasa lain, demos-cretein atau demos-cratos adalah bentuk negara di mana dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, keputusan diambil secara bersama-sama oleh rakyat, rakyat yang memiliki kekuasaan, pemerintahan yang dibuat rakyat dan dijalankan rakyat. Sementara itu, arti demokrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi adalah sebuah rencana sistematis yang dirancang untuk mengambil keputusan politik, di mana setiap individu diberi kekuasaan untuk menentukan cara berkompetisi secara adil berdasarkan suara rakyat.
- b. Sidney Hook mendefinisikan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung,

berdasarkan konsensus mayoritas yang diperoleh dari suara bebas masyarakat dewasa.

- c. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana para pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di ranah publik kepada warga negara. Warga negara tersebut berpartisipasi secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil yang mereka pilih.
- d. Henry B. Mayo menjelaskan bahwa demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menegaskan bahwa kebijakan publik ditentukan berdasarkan suara kebanyakan melalui wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat. Pemilihan-pemilihan itu diadakan secara rutin, menerapkan prinsip keadilan politik, dan dilakukan dalam situasi di mana kebebasan berpolitik terjamin..(Sulisworo et al., 2016)

## **2. Kesadaran Politik Mahasiswa**

Kesadaran politik mahasiswa di Indonesia masih menunjukkan tingkat yang beragam. Beberapa penelitian mencatat rendahnya minat mahasiswa terhadap kegiatan politik formal, meskipun mereka menyadari pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Sukarno (2011) menjelaskan bahwa demokrasi sebagai sistem pemerintahan menuntut partisipasi aktif dari warga negara yang memahami hak dan tanggung jawabnya. Pendidikan politik menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan ketidakstabilan demokrasi serta sebagai sarana untuk memperbarui institusi sosial dan politik yang ada.

### **2.2.4 Landasan Teori**

#### **2.2.4.1. Teori Peter L. Berger**

Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann dalam karya klasiknya *"The Social Construction of Reality"* (1966) mengemukakan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial. Menurut Berger, kehidupan sosial manusia adalah produk dari konstruksi yang dilakukan secara terus-menerus melalui tiga tahapan utama, yaitu: **eksternalisasi**, **obyektivasi**, dan **internalisasi**.

1. **Eksternalisasi** adalah proses di mana individu mengekspresikan diri ke dunia luar dalam bentuk aktivitas sosial, nilai, norma, dan institusi.
2. **Objektivasi** terjadi ketika hasil-hasil eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang dianggap objektif, di luar individu, dan mengikat bagi masyarakat.
3. **Internalisasi** adalah tahap di mana individu mengambil kembali realitas sosial tersebut ke dalam kesadaran pribadinya, menjadikannya sebagai bagian dari identitas dan perilakunya.

Dalam pandangan Berger, pendidikan – termasuk pendidikan politik – adalah salah satu sarana penting dalam proses konstruksi sosial ini. Melalui pendidikan, individu diajarkan nilai, norma, dan pemahaman tertentu tentang dunia sosial dan politik, yang kemudian diinternalisasi menjadi bagian dari identitas mereka.

#### 2.2.4.2 Keterkaitan dengan Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, teori konstruksi sosial Berger digunakan untuk memahami bagaimana **pendidikan politik di FISIPOL UMB** membentuk realitas sosial mahasiswa mengenai demokrasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika dosen, kurikulum, seminar, dan kegiatan organisasi mahasiswa memunculkan nilai-nilai demokratis seperti partisipasi politik, penghargaan terhadap perbedaan, dan sikap kritis terhadap kekuasaan.

Nilai-nilai tersebut kemudian melalui proses objektivasi: menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus — seperti dalam diskusi kelas, pemilihan ketua organisasi, dan forum akademik — sehingga dianggap sebagai norma atau sesuatu yang "biasa" dan "seharusnya" dijalani. Akhirnya, melalui internalisasi, mahasiswa FISIPOL UMB mengadopsi nilai-nilai demokratis tersebut ke dalam sikap, cara berpikir, dan perilaku mereka, baik dalam lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat setelah lulus.

Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya proses transfer pengetahuan, melainkan juga **proses rekonstruksi sosial** yang membangun kesadaran demokratis mahasiswa secara bertahap dan mendalam. Ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu membangun budaya demokratis melalui implementasi pendidikan politik.

#### **2.2.5 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah cara berpikir peneliti yang menjadi dasar untuk memperkuat fokus penelitian dan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan dasar yang mengarahkan penelitian agar prosesnya lebih jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan gambaran berpikir untuk memperluas konteks dan konsep penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dengan jelas konteks penelitian, metode yang digunakan, serta penerapan teori dalam penelitian tersebut. Penjelasan yang dibuat akan menggabungkan teori dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Peneliti mengungkapkan kerangka teori dalam bentuk kerangka konseptual sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti tersebut. Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Fisipol Umb Guna Membangun Budaya Demokratis.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut :

